

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Apabila masyarakat semakin sejahtera maka masyarakat juga akan semakin maju, bahwa kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting dalam menjalankan fungsinya. Hal ini sesuai dengan kewajiban negara terhadap rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Tahun pertama peningkatan pendapatan desa, yang biasa disebut “Dana Desa”, adalah tahun 2015. Pemerintah Indonesia menyiapkan Dana Desa untuk membantu masyarakat dan memberi mereka kendali lebih besar atas kehidupan mereka. Puluhan ribu kampung di Indonesia melakukan pembangunan dengan Cairnya Dana Desa ini. Dapat digunakan untuk segala keperluan Desa, baik itu kebutuhan pokok maupun hal-hal penting terdekat yang perlu diurus.

Abidin (dalam Dianti Lalira, 2018: 63) “dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperuntukkan bagi desa di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.” Karena pemerintah desa menangani uang dalam jumlah besar, maka pengelolaan keuangannya harus baik dan transparan. Penerapan keputusan keuangan daerah seperti ini memerlukan manajemen yang kuat. Akuntabilitas adalah janji perusahaan untuk memenuhi komitmen medianya secara jurnalistik.

Oleh karena itu, otonomi yang efektif memerlukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akses terhadap data yang relevan, khususnya Data Captive Manusia, sangat penting bagi kebijakan publik yang baik. Di permukaan, efisiensinya menunjukkan bahwa dokumentasi proyek desain sesuai dengan hasil aktual dan hasil prediksi. Kita dapat melihat bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah efektivitasnya sendiri, oleh karena itu penetapan RPJMDesa dan RKPDesa akan mempengaruhi efektivitas program pembangunan.

Pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan salah satu jenisnya. Pembangunan infrastruktur membantu aktivitas masyarakat. Karena masyarakat dapat membantu pemerintah membuat infrastruktur, alokasi dana desa juga digunakan. Implementasinya juga harus menunjukkan bahwa pendanaan sejalan dengan program yang disepakati oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini sering terjadi dalam alokasi anggaran daerah, dan pemerintah daerah tidak pandai dalam mengumpulkan dana yang dialokasikan untuk program. Karena masyarakat bingung dan perangkat lunak tidak berfungsi sesuai rencana, laporan tidak akan cukup. Pengadaan dan pelaksanaannya harus terbuka dan jujur. Tujuan ekonomi pertama pembangunan pedesaan adalah meningkatkan produksi untuk mengurangi kontaminasi bahan kimia. Kedua, tujuan sosial mendorong kemandirian masyarakat. Terakhir, tujuan budaya adalah untuk meningkatkan taraf hidup pedesaan. Pengambilan keputusan bertujuan untuk mengoptimalkan keterlibatan populasi sasaran dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek konstruksi, serta manfaat dan hasilnya.

Seringkali pemerintah tidak berhasil menyampaikan transfer dana kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui banyak mengenai hal tersebut. Masalah pertama belum terselesaikan karena para pemimpin desa membuat implementasi program menjadi buruk. Masyarakat mungkin akan merasa tidak puas terhadap pelayanan pemerintah daerah. Permasalahan distribusi tanah kabupaten kurang dipahami oleh banyak organisasi, termasuk masyarakat, dalam menjalankan sistem pemerintahan kabupaten. Membangun di lokasi memerlukan upaya untuk memastikan kelancaran proses perencanaan dan konstruksi. Transparansi dalam alokasi lahan memungkinkan masyarakat melacak inisiatif pembangunan infrastruktur. Untuk mencapai kemandirian desa, pemerintah desa harus bertanggung jawab atas dana komunal yang rencananya akan disalurkan. Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis berencana melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Nglanggeran” untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dana desa mempengaruhi partisipasi masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berikut kemungkinan rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Nglanggeran?
2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Nglanggeran?

1.3. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pembatasan agar hasil penelitian dapat menjadi lebih efektif. Penelitian ini dilakukan pada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Nglanggeran.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Nglangeran
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan infrastruktur di Desa Nglanggeran

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana dampak partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Nglanggeran.

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan lahan. Sehingga masyarakat bisa turut serta membangun infrastruktur dengan menggunakan dana daerah.

2. Bagi Pembaca

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dengan mengkaji hubungan antara alokasi biaya lahan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami program dan kebijakan pemerintah

dengan lebih baik sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bentuk ilmu akuntansi yang telah dikelompokan oleh perkuliahan, yang dapat menambah wawasan peneliti dan membandingkan dengan teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang terapat di lapangan.

4. Bagi Pemerintah

Untuk mendorong tanggung jawab, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi kinerja. Secara khusus, alokasi lahan untuk keperluan pertanian di desa Nglanggeran di kecamatan Patuk, provinsi Gunungkidul, dan hal ini dapat menjadi dasar evaluasi berkelanjutan pemerintah terhadap alokasi tersebut.

1.6. Kerangka Penulisan Laporan Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

Penulis membahas hal-hal berikut di bagian ini: dasar pemikiran penelitian, pertanyaan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, dan penulisan laporan.

BAB II. Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Pada bagian ini, penulis membuat tebakkan terhadap hipotesis yang akan menjadi landasan teoretis dalam perdebatan dan penelitian selanjutnya. Penulis juga menggali kerangka kerja, tinjauan literatur, dan pembuatan hipotesis di bagian ini.

BAB III. Metode Penelitian

Penulis menjelaskan cara melakukan penelitian dan menganalisis data pada bab ini.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penulis memberikan gambaran umum penelitian, menganalisis data, dan mendiskusikan temuan dalam bab ini.

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Paragraf tambahan ini memberikan gambaran umum penelitian dan penjelasannya, dilanjutkan dengan pembahasan latar belakang masalah dan konsekuensinya, dan terakhir, beberapa keterbatasan.